

APBDes QUALITY OF SUPERVISION APBDes TO THE ACCOUNTABLE VILLAGE GOVERNANCE

KUALITAS APBDes TERHADAP PENGAWASAN APBDes MENUJU TATA PEMERINTAHAN DESA YANG AKUNTABEL

Supartini

Muhammad Nurhadi Sulistiyono

Supartini1067@gmail.com

Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Jalan Walanda Maramis No 31, Cengklik, Surakarta

ABSTRACT

This study examined the influence of the quality of the supervision APBDes. APBDes Quality in this study are described by variables APBDes clarity, APBDes evaluation, and knowledge about the accuracy APBDes APBDes by BPD in Village Government. This study also examines the effect of supervision APBDes with public accountability. This research was conducted at the BPD who were in villages in Karanganyar. To test the hypothesis in this study using a statistical tool is multiple regression analysis and regression. Totaling 153 questionnaires distributed questionnaires and as many as 78 kuseioner or by 50.98%. Evaluation APBDes, APBDes accuracy and knowledge of APBDes by BPD significant positive effect on APBDes supervision. Clarity APBDes significant negative effect on APBDes supervision. Clarity APBDes, APBDes evaluation, and knowledge about the accuracy APBDes APBDes by BPD jointly significant positive effect on APBDes supervision. Supervision APBDes positive and significant impact on government accountability village.

Key Word: APBDes Quality, APBDes Oversight, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh kualitas APBDes terhadap pengawasan APBDes. Kualitas APBDes dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD di Pemerintahan Desa. Penelitian ini juga menguji pengaruh pengawasan APBDes dengan akuntabilitas publik. Penelitian ini dilakukan pada anggota BPD yang berada di desa-desa di Kabupaten Karanganyar. Untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan alat statistik yaitu analisis regresi berganda dan regresi. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 153 kuesioner dan sebanyak 78 kuseioner atau sebesar 50,98%. Evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes. Kejelasan APBDes berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBDes. Kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes. Pengawasan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa

Key Word : Kualitas APBDes, Pengawasan APBDes, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa : Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dengan Pemerintah Desa serta Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah fungsi legislasi, menjaring aspirasi dari masyarakat dan pengawasan .

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes.

Dalam persektif pemerintahan desa, pengawasan APBDes mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas kepada pemerintah desa harus diikuti pengawasan dan pengendalian yang kuat. Pengawasan APBDes oleh BPD harus dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (pertanggungjawaban). Untuk itu BPD dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep APBDes, berbagai peraturan yang terkait dengan APBDes. Apabila BPD lemah dalam tahap perencanaan,

maka sangat mungkin dalam tahap pelaksanaan akan mengalami banyak pentimpangan, padahal fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaku pemerintahan desa juga sangat terkait dengan tahap pelaksanaan APBDes itu sendiri. Kendala yang menjadi sebab kualitas APBDes adalah kurangnya pembuatan prioritas tujuan dan kurangnya pengetahuan tentang APBDes oleh BPD. Pengawasan APBDes oleh BPD harus dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk itu BPD dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsep APBDes dan berbagai peraturan yang terkait dengan APBDes.

Penelitian Robinson (2006), menyatakan kejelasan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran, variable keakuratan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran. Penelitian Yeni dan Irfan (2013) tentang pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan anggran menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD.

Penelitian ini menguji pengaruh kualitas APBDes terhadap pengawasan APBDes. Kualitas APBDes dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD di Pemerintahan Desa. Kualitas APBDes dalam penelitian ini memadukan antara penelitian Robinson (2006) dan Yeni dan Irfan (2013).

APBDes adalah instrusment penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakrasa dan inisiatif dalam mengelola keuangan

desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

APBDes yang berkualitas dan yang diawasi oleh BPD sejak penyusunan, pelaksanaan sampai pelaporan akan mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel. Penelitian ini juga menguji pengaruh dari pengawasan APBDes dengan akuntabilitas publik. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap APBDes, anggota BPD dihadapkan pada masalah kualitas APBDes berbasis kinerja, yang dalam penelitian ini dijelaskan variabel kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD. APBDes yang berkualitas disertai dengan pengawasan yang baik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada anggota BPD yang berada di desa-desa di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *convention sampling* (sampel berdasarkan kemudahan dari peneliti).

Untuk menguji hipotesa yang diajukan, variabel-variabel yang diteliti perlu diukur. Dalam penelitian ini variabel-variabel terdiri dari variabel independen, dan variabel dependen. Variabel independen yaitu kualitas APBDes (terdiri dari kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, pengetahuan tentang APBDes, keakuratan APBDes). Pengawasan APBDes sebagai variabel dependen. Hipotesa 2, pengawasan APBDes sebagai variabel independen dan akuntabilitas sebagai variabel dependen.

Analisa Data

Uji Kualitas Data

Menurut Hair, *et al* (1998) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Suatu konstruk atas instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Imam Ghozali, 2005). Uji homogenitas data (validitas) dengan uji *person correlation*. Jika hasilnya signifikan maka data dikatakan valid.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) serta korelasi antar variabel bebas, dimana suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas yakni apabila mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 serta memiliki tingkat korelasi antar variabel bebas dibawah 90% (Imam, 2005).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah varian dalam model regresi adalah sama. Uji ini akan dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesa

Untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan alat statistik yaitu analisis regresi berganda dan regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa-desanya di Kabupaten Karanganyar. Kuesioner disebarkan dengan cara mengantar langsung kepada responden. Kuesioner ditinggal kemudian diambil kembali sesuai dengan janji yang telah disepakati dengan responden.

Kuesioner yang disebarkan berjumlah 153 kuesioner dan yang dikembalikan sejumlah 86 kuesioner, dengan tingkat respon rate 56,21%. Sebanyak 8 kuesioner tidak dapat diikutsertakan dalam analisis karena pengisian yang tidak lengkap. Jumlah data yang bisa diolah adalah sebanyak 78 kuesioner atau sebesar 50,98%.

Uji kualitas Data

1. Uji Reliabilitas

Uji kualitas data meliputi uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Nunanaly, 1967 dalam Imam, 2005). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 1

Tabel 1.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kejelasan APBDes	0,955	Reliabel
Evaluasi APBDes	0,960	Reliabel
Keakuratan APBDes	0,939	Reliabel
Pengetahuan APBDes	0,964	Reliabel
Pengawasan APBDes	0,953	Reliabel
Akuntabilitas	0,972	Reliabel

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel kejelasan APBDes mempunyai nilai *cronbach alpha* 0,955. Variabel evaluasi APBDes

mempunyai nilai *cronbach alpha* 0,960. Variabel keakuratan APBDes mempunyai nilai *cronbach alpha* 0,939. Variabel pengetahuan tentang APBDes mempunyai nilai *cronbach alpha* 0,964. Variabel pengawasan APBDes, akuntabilitas masing-masing mempunyai nilai *cronbach alpha* 0,953 dan 0,972. Nilai *cronbach alpha* dari semua variabel di atas 0,6 sebagai nilai *cutoff*. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mengukur konstruk kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes, pengetahuan APBDes, pengawasan APBDes dan akuntabilitas adalah valid artinya benar-benar mengungkapkan hal yang diukur dalam kuesioner.

2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate (pearson correlation)* antara masing-masing skor indikator dengan skor konstruk. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Kisaran	Keterangan
	Korelasi	Signifikansi
		0,01
Kejelasan APBDes	0,839 – 0,895	Valid
Evaluasi APBDes	0,828 – 0,895	Valid
Keakuratan APBDes	0,832 – 0,942	Valid
Pengetahuan APBDes	0,767 - 0,916	Valid
Pengawasan APBDes	0,745 – 0,932	Valid
Akuntabilitas	0,751 – 0,913	Valid

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mengukur konstruk kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes, pengetahuan APBDes, pengawasan APBDes dan akuntabilitas adalah valid artinya benar-benar mengungkapkan hal yang diukur dalam kuesioner.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji Multikolinieritas akan digunakan angka *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan tolerance. Sebuah model regresi akan bebas dari Multikolinieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka toleransi lebih besar dari 0,10

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kejelasan APBDes	0,290	3,445
Evaluasi APBDes	0,202	4,960
Keakuratan APBDes	0,270	3,705
Pengetahuan APBDes	0,336	2,976

Dependent Variable: Pengawasan APBDes

Hasil uji multikolinieritas di atas diketahui besarnya VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 mempunyai angka toleransi lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah varian dalam model regresi adalah sama. Uji ini akan dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Untuk menguji hipotesis 1 menggunakan uji regresi linear ganda. Hasil uji hipotesis diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = -1,093 + -0,308X_1 + 0,751X_2 + 0,359X_3 + 0,297X_4 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kejelasan APBDes dengan nilai signifikansi negative 0,00 artinya kejelasan APBDes berpengaruh negative terhadap pengawasan APBDes, artinya semakin tinggi kejelasan APBDes akan semakin rendah terhadap pengawasan APBDes.
- 2) Evaluasi APBDes dengan nilai signifikansi positif 0,00 artinya evaluasi APBDes berpengaruh positif terhadap pengawasan APBDes, sehingga semakin tinggi evaluasi APBDes maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pengawasan APBDes.
- 3) Keakuratan APBDes dengan nilai signifikansi positif 0,00 artinya keakuratan APBDes berpengaruh positif terhadap pengawasan APBDes, sehingga semakin tinggi keakuratan APBDes maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pengawasan APBDes.
- 4) Pengetahuan APBDes oleh BPD dengan nilai signifikansi positif 0,00 artinya pengetahuan APBDes berpengaruh positif terhadap pengawasan APBDes, sehingga semakin tinggi pengetahuan APBDes maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pengawasan APBDes

Uji T

Dari uji t diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes, pengetahuan APBDes, secara parsial berpengaruh signifikan pengawasan APBDes. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel kurang dari 0,05. Untuk variabel kejelasan APBDes pengaruh negatif signifikan.

Uji F

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 181,062$ signifikansi 0,000. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes, pengetahuan APBDes, berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBDes.

Koefisien Determinasi

Uji R^2 didapatkan hasil *Ajusted R Square* sebesar 0,903 atau 90,03 %. yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 90,03% sedangkan sisanya (9,97%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji Hipotesa 2

Hasil uji hipotesis 2 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 3,823 + 1,478X_1 + e$$

- 1) $b_0 = 3,823$ artinya apabila pengawasan terhadap APBDes nihil berarti itu akuntabilitas pemerintahan desa.
- 2) Pengawasan APBDes positif signifikan 0,000 artinya semakin tinggi pengawasan BPD terhadap APBDes akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Pembahasan.

Pengaruh keakuratan APBDes terhadap pengawasan ABPDDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keakuratan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBDes. Hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin akurat APBDes yang dilakukan BPD maka semakin meningkat pula pengawasan APBDes yang dilakukan oleh BPD.

Pengaruh pengetahuan APBDes terhadap pengawasan ABPDDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keakuratan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBDes. Hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin akurat APBDes yang akan dijalankan pemerintahan desa maka semakin meningkat pula pengawasan APBDes yang dilakukan oleh BPD.

Pengaruh kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan APBDes terhadap pengawasan ABPDDes

Hasil analisis menunjukkan secara bersama-sama kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes, pengetahuan APBDes, berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBDes. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seberapa baik kualitas anggarannya akan menentukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, hasil penelitian ini mendukung pernyataan tersebut, bahwa kualitas anggaran mempengaruhi efektivitas pengawasan anggaran yang menjadi salah satu fungsi dari lembaga permusyawaratan desa (BPD).

Pengaruh pengawasan ABPDDes terhadap akuntabilitas pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin ketat pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan BPD maka semakin meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh DPB terhadap pelaksanaan APBDes dari penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, tentunya akan memicu pemerintah desa untuk berhati-hati dalam pelaksanaan APBDes tersebut. Sehingga pertanggungjawaban terhadap APBDes juga akan meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kejelasan APBDes berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBDes.

2. Evaluasi APBDes berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes.
3. Keakuratan APBDes berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes.
4. Pengetahuan tentang APBDes oleh BPD berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes.
5. Kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan engetahuan tentang APBDes oleh BPD secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes.
6. Pengawasan APBDes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa.

Saran

Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas di masa yang akan datang, khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan hubungan kualitas APBDes dengan pengawasan APBDes. Hal ini disarankan untuk menambah variabel lain yang berhubungan dengan kualitas APBDes. Penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk pemerintahan desa menuju tata pemerintahan desa yang baik (*good government governance*) (akuntabilitas, partisipasi dan transparansi). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan akuntabilitas terutama di pemerintahan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Hansen, Don R. dan M.M. Mowen. 2003. *Management Accounting*. 6th Edition. South-Western College Publishing.
- Hansen, E.I. 1996. "The Budgetary Control Function" *The Accounting Review*. Vol. April, hal 324-335
- Imam Ghozali (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002), *Metodelogi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta
- Mulyadi, 1993. *Akuntansi Manajemen*, STIE YKPN. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 10 Tahun 2000 tentang penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa.
- , Kabupaten Karanganyar No 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- , Kabupaten Karanganyar No 10 Tahun 2012 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- , *Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan*,

- Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Revrison Baswir, 1999. Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 1998. *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Application*. 8 Ed, Prentice Hall Inc.
- Robinson, 2006. Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran: Pengetahuan tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating. Tesis Program Pasca Sarjana UNDIP (tidak dipublikasikan).
- Uma Sekaran (1992), *Research Methods For Business : A Skill Budding Approach*, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Yeny Zeviana dan Irfan Muhammad, 2013. Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran Keuangan daerah Khususnya APBD dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating, SNA XVI Manado